

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN
KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

(Studi di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

Aten Nggala Karanggu Limu

NIM . 2019210008

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

1.3.RINGKASAN

Kerangka konstitusi dan peraturan Indonesia telah dirancang untuk membuat Ormas dikelola. Menurut pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak untuk berkumpul, berorganisasi, dan mengeluarkan pendapat secara lisan, dan mereka semua dipandang berperan penting dalam memungkinkan dukungan yang kuat dari semua lapisan masyarakat secara terbuka.

Ormas harus mengadopsi Pancasila sebagai konsep pedoman karena pentingnya pekerjaan mereka dan sesuai dengan inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap Pancasila untuk menjaga pelestariannya dalam masyarakat, negara, dan bangsa. memberitakan keberadaan kelompok sosial, persatuan bangsa, dan politik Kota Malang. (2) Untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan mengecilkan hati yang mempengaruhi bagaimana kelompok sosial dilaporkan ke entitas kesatuan nasional dan politik. Bidang minat utama studi ini adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Metodologi kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Informan tersebut meliputi: (1) tokoh politik dalam negeri; (2) pegawai ormas; (3) wartawan ormas; dan (4) kelompok masyarakat sipil.

Kata Kunci: Pentingnya Peranan Organisasi Kemasyarakatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerangka konstitusi dan peraturan Indonesia telah dirancang untuk membuat Ormas dikelola. Seluruh rakyat Indonesia diakui sangat penting dalam mendukung dukungan dinamis seluruh lapisan masyarakat dalam pengakuan publik berdasarkan pasal 28 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikirannya secara lisan. Sebagai bagian dari konstruksi UUD 1945, Pancasila memastikan peningkatan bantuan sosial pemerintah sebagai akta Pancasila sekaligus menjamin tercapainya tujuan ekologis.

Menurut Peraturan Ormas Nomor 17 Tahun 2013, perlu diingat bahwa Ormas Afiliasi adalah afiliasi yang secara khusus dibingkai tetap oleh lingkungan yang dekat satu sama lain, mengingat kerinduan, kebutuhan, minat, latihan, dan tujuan yang luar biasa untuk ikut serta dan membina dalam rangka mencapai keyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergantung pada Pancasila. Ormas adalah penjumlahan yang disengaja yang dibuat oleh orang atau kelompok. Tanpa mencari keuntungan finansial, mereka mungkin berhasil memajukan penyebab atau kepentingan publik, memungkinkan implementasi kebijakan publik baru dan optimis yang menguntungkan orang sepenuhnya.

Siklus yang dilalui individu sambil belajar tentang keluarganya dapat digunakan untuk membangun negara. Siklus ini dapat terjadi sendiri atau bersamaan dengan pertemuan lokal yang melihat peningkatan keinginan yang tak

terduga untuk institusi dan tujuan yang hampir sebanding. Kesbangpol Kota Malang menunjukkan bagaimana 114 Afiliasi Wilayah terdaftar, masing-masing terdiri dari Himpunan Pedoman Umum (AHU) 99 Ormas dan SKT 22 Ormas, telah berkembang secara lokal dan bebas dalam waktu singkat. Namun 154 Ormas yang tergabung dalam Ormas SKT tidak bersifat dinamis (pendaftaran ulang).

Karena pentingnya kedudukan mereka dan upaya yang mereka lakukan untuk memajukan kesadaran dan pengamalan Pancasila dalam masyarakat, negara, dan negara, organisasi kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila sebagai dasar eksklusif untuk mempertahankan Pancasila. Metode otoritas publik kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang pembatasan lingkungan.

Melalui kelompok lokal, masyarakat umum dapat mengungkapkan pikiran dan pandangannya. Warga negara Republik Indonesia dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat unsur-unsur kerjasama seluruh lapisan masyarakat dalam penerangan UUD 1945, yang bertujuan untuk menjamin penguatan ketangguhan dan keterpercayaan daerah, menjamin hasil-hasil pembangunan daerah sebagai perwujudan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan daerah.

Meskipun keberadaan asosiasi menunjukkan dedikasi yang serius untuk kemajuan, masyarakat setempat tetap menjadi rumah bagi banyak organisasi yang berperilaku tidak menentu dan menimbulkan masalah. Untuk melihat keberadaan suatu perkumpulan massa diperlukan dokumen-dokumen seperti surat administrasi, gambaran pendaftaran perkumpulan, jadwal kerja, surat wasiat kependudukan,

orang-orang yang bekerja untuk kepentingan perkumpulan massa, serta spanduk dan stempel yang berlogo perkumpulan massa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, suatu badan teknis daerah di bawah arahan Pemerintah Kota Malang, bertugas melaksanakan tugas pokok yang tercantum dalam Permendagri No. 1. Organisasi Solidaritas Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Pasal 56 Tahun 2017 untuk mengelola perkumpulan daerah, bertugas memberikan pembinaan, pengendalian pendaftaran, dan mengembangkan strategi kewilayahan di bidang solidaritas publik dan masalah legislatif dalam negeri. Berdasarkan hasil beberapa observasi menunjukkan bahwa telah terjadi pemberitaan kelompok politik dan persatuan bangsa di Kota Malang sejak lama.

Kelompok masyarakat berusaha meniru kemandirian dan profesionalisme organisasi massa yang kuat, yang penting untuk pertumbuhan negara. Organisasi lokal yang bebas, andal, jujur, dan akuntabel sangat penting untuk menangani peristiwa global. Agar ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan dukungan dan penguatan lokal, terutama dalam mengembangkan ketahanan sosial, kerjasama masyarakat, dan ketahanan dalam keterlibatan publik, serta menjaga dan memperkuat solidaritas dan kejujuran publik. Berdasarkan studi literatur yang didukung hasil penelitian maka penelitian ini sangat penting di lakukan dengan judul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Studi Di Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang)**

1.2 Rumusan masalah

2. Bagaimana strategi pemerintah dalam pemberitaan kelompok sosial, Persatuan Bangsa, dan politik yang dilakukan di Kota Malang?
3. Apa alasan yang mendorong dan mengecilkan hati entitas persatuan nasional dan politik untuk melaporkan keberadaan organisasi sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode pemberitaan pemerintah Kota Malang tentang pengelompokan sosial, persatuan ras, dan politik.
2. Untuk menentukan apa yang memengaruhi pengumuman kehadiran asosiasi sosial di entitas kesatuan publik dan politik dan apa yang tidak?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan, terutama yang ditulis dalam hard copy artikel-artikel logis
2. Sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah laporan tentang kelompok sosial harus tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, A. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Untuk Pemerintahan dari Teori ke Praktik)*. Penerbit Widina.
- David, Easton. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Komariah, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Moleong. Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi.
- Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Celeban Timur UH III/54B Yogyakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Purwanto, A., & Taftazani, B. M. 2018. Pengaruh jumlah tanggungan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja k3l Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 33-43. Diakses dari <http://journal.unpad.ac.id/focus/article/view/18255>. Tanggal 5 januari 2023
- Setiawan, A., Sujaini, H., & Pn, A. B. 2017. Implementasi Optical Character Recognition (OCR) pada Mesin Penerjemah Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. *J. Sist. dan Teknol.* Di akses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/viewFile/18726/15775>. Tanggal 5 januari 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan